

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, MASA KERJA, PELATIHAN, DAN POSISI DI  
PEMERINTAHAN TERHADAP PEMAHAMAN  
LAPORAN KEUANGAN DAERAH  
(STUDI EMPIRIS PADA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF  
DI LEMBAGA PEMERINTAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Memperoleh gelar S-2 Magister Akuntansi



Diajukan oleh :

Nama : Dwi Cahyadi  
NIM : C4C006387

Kepada  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2009

## ABSTRAKSI

Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan, dan posisi di pemerintahan terhadap pemahaman atas laporan keuangan daerah. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah pentingnya pemahaman yang baik terhadap laporan keuangan daerah oleh pihak legislatif dan eksekutif pada pemerintah daerah untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pihak eksekutif sebagai pembuat laporan keuangan daerah menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada DPRD selaku badan legislatif setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Populasi penelitian ini adalah tim anggaran eksekutif dan panitia anggaran pada legislatif sejumlah 46 responden. Analisis Regresi yang dijalankan dengan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) digunakan untuk menganalisis data. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, kemudian dilakukan uji hipotesis melalui uji F dan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan, dan posisi di pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman atas laporan keuangan daerah. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan, dan posisi di Pemerintahan terhadap variabel dependen (pemahaman atas laporan keuangan daerah) sebesar 71,5%, sedangkan sisanya 28,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

**Kata Kunci: Pemahaman terhadap laporan keuangan daerah, Tingkat pendidikan, Masa kerja, Pelatihan, Posisi di pemerintahan,**

## ABSTRACT

This study aimed to test the influence of education level, years of service, training, and government positions to the understanding of the financial statements. Common problems in this research is the importance of a good understanding of financial reports by the *legislatif* and *eksekutif* in local government for the purposes of planning, controlling, and decision-making. The *eksekutif* as a maker of financial statements communicate the financial report to Parliament as a *legislatif* body after the audit by the *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)* as one form of local governance accountability.

The population of this research is a *tim anggaran eksekutif* and *panitia anggaran legislatif* on a number of 46 respondents. Regression analysis carried out with the software Statistical Product and Service Solution (SPSS) was used to analyze the data. Before performing tests of hypotheses, testing the validity and reliability, then conducted tests of hypotheses through the F test and t test.

The results showed that the level of education, tenure, training, and positions in government have a positive and significant impact on the understanding of the financial statements. Value of the coefficient of determination indicates that together the level of education, tenure, training, and the Government's position on the dependent variable (the understanding of the financial statements) of 71.5%, while the remaining 28.5% influenced by other factors outside the model.

**Keywords:** Understanding the financial statements, educational level, period of employment, training, government position.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah mengalami beberapa penyempurnaan sampai dengan lahirnya Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam hal ini juga terjadi perubahan yang signifikan mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di daerah karena kedua lembaga tersebut memiliki kekuatan yang sama dan bersifat sejajar menjadi mitra dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan

keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual maupun standar-standar akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Sejalan dengan terus bergulirnya reformasi, perubahan peran dari lembaga pemerintahan daerah adalah bagi pelayanan publik (*public service*) secara efektif dan efisien melalui otonomi daerah. Hal ini tentunya akan menuntut peran baru eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan dan pengaturan keuangan dan anggaran daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Peran eksekutif dan legislatif tersebut menuntut sumberdaya manusia yang berkualitas. Salah satu indikator sumber daya manusia berkualitas adalah tingkat pendidikan ([www.Damandiri.or.id](http://www.Damandiri.or.id),2009). Sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan yang tinggi akan mampu membantu karyawan dalam menyelesaikan tugas terutama dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan daerah. Mautz dan Sharaf (1961) dalam artikel Rizmah Nurchasanah (1999) menyatakan bahwa untuk dapat menjalankan kewajibannya, ada tiga komponen yang harus dimiliki oleh auditor, yaitu kompetensi, independensi, dan *due pressional care*. Artinya kompetensi yang termanifestasi dalam pendidikan seseorang mempengaruhi kualitas kerjanya.

Kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh masa kerja, karena dengan masa kerja yang lebih lama, baik eksekutif maupun legislatif tentunya telah berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan khususnya dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan. Dalam literatur psikologi dan auditing menunjukkan bahwa efek dilusi dalam auditing bisa berkurang oleh auditor yang berpengalaman karena struktur pengetahuan yang baik dari auditor yang berpengalaman menyebabkan mereka mengabaikan informasi yang tidak relevan (Sandra, 1999 dalam Yudhi dan Meifida, 2006). Dengan kata lain kompleksitas tugas yang dihadapi sebelumnya oleh seseorang akan menambah pengalaman serta pengetahuannya. Pendapat ini didukung oleh Abdolmohammadi dan Wright (1987 dalam Yudhi dan Meifida, 2006) yang menunjukkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pelatihan, mengingat bahwa melalui pelatihan mampu memberikan tambahan kemampuan dalam menghadapi perubahan maupun penyesuaian sistem kerja di masa mendatang. Boner dan Walker (1994 dalam Yudhi dan Meifida, 2006), mengatakan bahwa peningkatan pengetahuan yang muncul dari pelatihan formal sama bagusnya dengan yang didapat dari pengalaman khusus. Pelatihan tersebut berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, simposium, lokakarya pelatihan itu sendiri dan kegiatan penunjang ketrampilan lainnya. Melalui program pelatihan para auditor juga mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ditemui (Putri dan Bandi, 2002 dalam Yudhi dan Meifida, 2006).

Dalam pemerintahan daerah dikenal lembaga eksekutif dan legislatif. Eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki kebijakan dalam pengajuan anggaran dan

membuat laporan keuangan, sehingga dituntut untuk memahami laporan keuangan daerah itu sendiri. Demikian juga dengan legislatif sebagai panitia anggaran juga perlu memahami laporan keuangan daerah, agar dalam pengesahan anggaran dan laporan keuangan benar-benar tahu kondisi laporan keuangan yang sebenarnya. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penelitian ini diberi judul ” Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan, Dan Posisi Di Pemerintahan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Eksekutif dan Legislatif di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara) ”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu daerah yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah pada tahun 2008. Salah satu penyebabnya adalah dalam hal penyajian laporan keuangan daerah, masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu diperlukan peran dari pihak eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan dan pihak legislatif sebagai pengawas jalannya pemerintahan guna mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut khususnya pemahaman terhadap laporan keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara?
2. Apakah terdapat pengaruh masa kerja terhadap pemahaman laporan keuangan daerah di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara?
3. Apakah terdapat pengaruh pelatihan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara?
4. Apakah terdapat pengaruh posisi pemerintahan di eksekutif dan legislatif terhadap pemahaman laporan keuangan daerah di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara?



### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah di atas. Berdasarkan rumusan masalah tersebut disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui pengaruh masa kerja terhadap pemahaman laporan keuangan daerah di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara.
4. Untuk mengetahui pengaruh posisi pemerintahan di eksekutif dan legislatif terhadap pemahaman laporan keuangan daerah di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pihak eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan sekaligus pembuat laporan keuangan daerah khususnya di Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman terhadap laporan keuangan daerah sehingga dapat mengevaluasi dan meningkatkan pemahaman serta kinerjanya dalam penyajian laporan keuangan daerah.
2. Bagi pihak legislatif sebagai pengawas jalannya pemerintahan khususnya di Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat menilai pemahaman mereka terhadap laporan keuangan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat mengevaluasi dan meningkatkan fungsi pengawasannya.

3. Bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Banjarnegara dapat mengetahui bagaimana pemahaman eksekutif dan legislatif terhadap laporan keuangan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat memberikan masukan-masukan untuk perbaikan.
4. Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah wawasan tentang laporan keuangan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap laporan keuangan daerah.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam lima bab. Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II tinjauan pustaka menyajikan telaah teori, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian. Bab III metode penelitian terdiri atas disain penelitian, jenis, dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, serta teknik analisis data. Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan pada bab V berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan implikasi.